

ANALISIS DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

THE ANALYSIS OF SPECIAL ALLOCATION FUNDS AGAINST ECONOMIC GROWTH AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN SOUTH SULAWESI PROVINCE

Ismayani Amir

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Muhammad Yusri Zamhuri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Sanusi Fattah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh DAK bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) secara langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) secara langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; pengaruh DAK bidang lain-lain terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) secara langsung atau melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah *pooled data* (data panel) yang merupakan gabungan data *time series* yaitu tahun 2010 sampai 2016 dan data *cross section* yaitu 24 kabupaten/kota, dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, DAK bidang pendidikan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap IPM dan secara tidak langsung pengaruh DAK bidang pendidikan terhadap IPM dapat dimediasi melalui pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, DAK bidang kesehatan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap IPM dan secara tidak langsung pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap IPM dapat dimediasi melalui pertumbuhan ekonomi. *Ketiga*, DAK bidang lain-lain secara langsung berpengaruh signifikan terhadap IPM dan secara tidak langsung pengaruh DAK bidang lain-lain terhadap IPM dapat dimediasi melalui pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Kata kunci: Dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan, kesehatan, lain-lain, pertumbuhan ekonomi, IPM, Sulawesi Selatan.

Abstract: This study aims to knowing and analyze the impact of DAK on education on Human Development Index (HDI) directly or through economic growth in regencies/cities in South Sulawesi Province; the effect of DAK on health on Human Development Index (HDI) directly or through economic growth in regencies / cities in South Sulawesi Province; other DAK influence on Human Development Index (HDI) directly or through economic growth in regencies / cities in South Sulawesi Province; and the influence of economic growth on Human Development Index (HDI) in regencies / cities in South Sulawesi Province. Data used in the research were the secondary data, namely the data obtained from the general directorate of regional government financial balance and central bureau of statistics. He types od data used were the pooled data (panel data) representing a combination of the time series data from 2010 to 2016 and the cross section data from 24 regencies/cities using the panel data regression analysis with the help of Eviews 9 program. The research result indicates that: 1) SAF of the education sector has the directly significant effect on HDI and indirectly the influence of SAF of the education sector on HDI can be mediated through the economic growth, 2) SAF of the health sector has directly significant effect on HDI and indirectly the influence of SAF of the health sector on HDI can be mediated through the economic growth, 3) SAF

of the other sectors has directly significant effect on HDI and indirectly the influence of SAF of the other sectors on HDI can be mediated through the economic growth, 4) the economic growth has the significant effect on HDI.

Keywords: *Special allocation fund (SAF) of sectors of education, health, and others, economic growth, Human Development Index (HDI), South Sulawesi.*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia (UNDP, 1990). Di antara pilihan-pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup layak. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui indeks pembangunan manusia (IPM). IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf, serta kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (Novarianti, 2016).

Secara konseptual, IPM merupakan indeks komposit yang diukur dengan menggabungkan tiga dimensi pembangunan manusia. Dimensi tersebut adalah dimensi pendidikan yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang/angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah (indeks pendidikan); dimensi kesehatan yang diukur dengan usia harapan hidup (indeks kesehatan); serta dimensi standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan atau pengeluaran riil perkapita (indeks daya beli). Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.

Pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun, angka IPM yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan angka IPM Nasional dan provinsi lain masih rendah. Untuk wilayah kawasan timur Indonesia nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan masih di bawah angka IPM Provinsi Sulawesi Utara. Nilai IPM Sulawesi Selatan masih berada di bawah rata-rata nasional dan masih jauh dari target RPJMD. Berdasarkan data publikasi BPS, meskipun sejak tahun 2010 sampai 2016 IPM Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan secara rata-rata sebesar 0,63 poin, namun peningkatan ini belum signifikan meningkatkan posisi IPM Sulawesi Selatan secara nasional. Indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan pada tahun 2016 sebesar 69,76 yang

menempatkan Sulawesi Selatan berada pada peringkat empat belas diantara 33 provinsi. Peringkat ini tentunya masih jauh dari target RPJMD Sulawesi Selatan periode 2010 sampai 2016 yang mencanangkan masuk dalam kategori sepuluh besar nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Hal ini dapat diukur berdasarkan kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Dengan kata lain PDRB merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi secara regional yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi regional yang dicerminkan oleh PDRB sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang turut memberi andil dalam pertumbuhan produksi dari masing-masing sektor. Perkembangan PDRB baik berdasarkan atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun dapat mencerminkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pertumbuhan ini tentunya akan dapat menggambarkan kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut selama kurun waktu tertentu.

Berdasarkan data publikasi, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2016 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011. Turunnya pertumbuhan ekonomi pernah terjadi pada tahun 2011 hingga 2013, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7,30 persen pada tahun 2012 menjadi 5,84 persen di tahun 2013 atau mengalami penurunan sebesar 1,46 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi masih cenderung menurun yaitu sebesar 7,07 persen atau kembali mengalami penurunan sebesar 3,64 persen dari tahun sebelumnya. Turunnya pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dari 6,43 persen menjadi 1,62 persen di tahun 2016 atau mengalami penurunan sebesar 4,81 persen dari tahun sebelumnya. Angka capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2014 dicapai oleh Kabupaten Selayar sebesar 11,26 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Luwu Timur tahun 2016 sebesar 1,62 persen. Pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional terlihat pertumbuhan ekonomi rata-rata kabupaten/kota dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang meliputi DAK bidang pendidikan, DAK bidang kesehatan dan DAK lain-lain. Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK merupakan kewenangan dari pemerintah daerah karena DAK adalah bagian dari APBD, supaya penggunaan DAK pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan nasional maka penggunaan DAK diatur melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJKD) terlihat bahwa alokasi aana alokasi khusus (DAK) kabupaten/ kota di Provinsi

Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai 2016 mengalami fluktuasi dan meningkat tajam pada tahun 2016. Rata-rata DAK tahun 2010 sampai 2016 terbesar dialokasikan ke Kabupaten Bone sebesar Rp.107.135,36 juta sedangkan alokasi DAK terendah pada Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp.53.230,84 juta.

Alokasi anggaran DAK bidang pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai 2016 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh DJPKD, rata-rata alokasi DAK bidang pendidikan terbesar dialokasikan pada Kabupaten Bone sebesar Rp.30.771,74 juta sedangkan yang terendah dialokasikan pada Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp.10.650,32 juta. Berbeda dengan Alokasi anggaran DAK bidang pendidikan yang cenderung menurun alokasi anggaran DAK bidang kesehatan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai 2016 justru mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Rata-rata alokasi DAK bidang kesehatan terbesar dialokasikan pada Kabupaten Wajo sebesar Rp.21.977,71 juta sedangkan yang terendah dialokasikan pada Kabupaten Maros sebesar Rp.5.990,64 juta.

Sama halnya dengan alokasi anggaran DAK bidang kesehatan, alokasi anggaran DAK bidang lain-lain kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2010 sampai 2016 juga mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, DAK bidang lain-lain merupakan DAK gabungan yang meliputi DAK infrastruktur, DAK pertanian, DAK kelautan dan perikanan, DAK prasarana pemerintahan daerah, DAK lingkungan hidup, DAK kehutanan, DAK sarana dan prasarana pedesaan dan DAK perdagangan. Rata-rata alokasi DAK lain-lain terbesar dialokasikan pada Kabupaten Bone sebesar Rp.66.936,64 juta sedangkan terendah dialokasikan pada Kota Makassar sebesar Rp.27.402,19 juta.

Dalam penelitian ini, diharapkan dana perimbangan khususnya dana alokasi khusus (DAK) dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dengan IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menggunakan dana perimbangan untuk membiayai belanja modal seperti pembanguna sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia pada akhirnya akan meningkatkan IPM suatu daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). IPM merupakan suatu pengukuran perbandingan dari tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*lifeexpectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacyrate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). IPM juga dapat dikatakan sebagai suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif.

Menurut (Todaro, 2003) indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan perangkat yang sangat bermanfaat untuk mengukur tingkat kesejahteraan antara negara maupun antara daerah. Indikator IPM jauh melebihi pertumbuhan konvensional. Pertumbuhan ekonomi penting untuk mempertahankan kesejahteraan rakyat, namun pertumbuhan bukan akhir dari pembangunan manusia. Pertumbuhan hanyalah salah satu alat, yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi digunakan untuk memperbaiki kapabilitas manusianya dan bagaimana rakyat menggunakan kapabilitas tersebut. salah satu keuntungan IPM adalah, indeks ini mengungkapkan bahwa sebuah negara/daerah dapat berbuat jauh lebih baik pada tingkat pendapatan yang rendah, dan bahwa kenaikan pendapatan yang besar hanya berperan relatif kecil dalam pembangunan manusia (Todaro, 2003).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang dianggap cukup untuk menerangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu teori Solow-Swan. Teori pertumbuhan ini dikembangkan oleh Robert Solow (*Massachussets Institute of Technology*) dan Trevor Swan (*The Australian National University*). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

Menurut Tambunan (2011), pertumbuhan ekonomi adalah penambahan produk domestik bruto (PDB) yang berarti peningkatan pendapatan nasional (PN). Sedangkan menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2000). Menurut Djojohadikusumo (1994) pertumbuhan ekonomi berpokok pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Boediono (1999), menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap PDB. Apabila terjadi peningkatan pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dikenal dengan "*The law of Expanding State Expenditure.*" Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jepang, Jerman).

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan besarnya penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

4. Sumber Penerimaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Oleh sebab itu DAK dicantumkan dalam APBD. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Menurut Kuncoro (2004), Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu, alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan APBN. Dana alokasi khusus (DAK) dapat disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik (Ndadari dan Adi, 2008). DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Halim (2004) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

1. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 24 kabupaten/kota. Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2010 sampai 2016. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode data panel yaitu gabungan antara data *time series* (tujuh tahun) dengan data *cross section* (24 kabupaten/kota) sehingga diperoleh jumlah data sebanyak 168 data panel (*pooled data*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

- a. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional dan tetap

memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dalam penelitian ini terbagi atas DAK bidang pendidikan, DAK bidang kesehatan, dan DAK lain-lain (kumpulan DAK selain pendidikan dan kesehatan). DAK dalam penelitian ini adalah realisasi DAK pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diukur dengan satuan jutaan rupiah.

- b. Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dalam suatu tahun tertentu. Pertumbuhan ekonomian dalam penelitian ini adalah PDRB harga berlaku pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diukur dengan satuan persen.
- c. IPM merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, diukur dengan indeks dalam satuan desimal.

3. Teknik Analisis

Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif, dimana analisis kuantitatif dilakukan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dan pembahasan yang dinyatakan dalam angka, dan untuk mendukung analisis tersebut penelitian ini menggunakan *software* Eviews 9 untuk mempermudah perhitungan maupun estimasi data penelitian.

HASIL ANALISIS

1. Hasil Pengujian Model

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Eviews 9 ditemukan bahwa model yang paling sesuai dalam analisis data panel persamaan fungsi Y_1 dan persamaan fungsi Y_2 adalah *Common Effect Model*.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Berdasarkan hasil analisis bahwa tidak terjadi Multikolinearitas. Hal ini diperkuat dengan hasil korelasi antar variabel bebas yang tidak ada di atas 0,80 atau berkorelasi sempurna.

Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis residual menggunakan *software* Eviews 9 diperoleh nilai probabilitas variabel independen secara keseluruhan $>$ nilai alpha 0,05. Nilai Probabilitas adalah 0,6470 (DAK_P), 0,7068 (DAK_K), 0,9843 (DAK_L), sehingga hipotesis H_0

diterima dan disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. c.

Autokorelasi

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) pada fungsi Y_1 adalah sebesar 2,0837. Nilai ini jika dibandingkan dengan tabel DW berada diantara du (1,7841) dan 4-du (2,2159) sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan pada fungsi Y_2 diperoleh nilai DW sebesar 1,9293 dimana nilai ini berada diantara du (1,7966) dan 4-du (2,2034) sehingga disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, pada persamaan fungsi Y_1 diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 2,452705 dengan probabilitas sebesar 0,293361. Dengan demikian nilai probabilitas Jarque-Bera besar dari alpha 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Sedangkan pada persamaan fungsi Y_2 diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 3,230166 dengan probabilitas sebesar 0,198874. Dengan demikian nilai probabilitas Jarque-Bera besar dari alpha 0,05, sehingga asumsi normalitas terpenuhi.

3. Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan dari hasil estimasi data panel dengan model Common Effect, dapat diketahui bahwa nilai R-Square adalah sebesar 0.311416 atau 31,14 persen variabel pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan oleh tiga variabel independen penelitian, yaitu DAK pendidikan, DAK kesehatan dan DAK lain-lain. Sedangkan sisanya sebesar 0,688584 atau 68,86 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil estimasi data panel dengan model Common Effect, dapat diketahui bahwa nilai R-Square adalah sebesar 0.818541 atau 81,85 persen variabel indeks pembangunan manusia (IPM) mampu dijelaskan oleh tiga variabel independen penelitian, yaitu DAK pendidikan, DAK kesehatan, DAK lain-lain dan satu variabel dependen yaitu, pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya sebesar 0,181459 atau 18,15 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4. Hubungan Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian

- a. Variabel DAK Pendidikan pada mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0005 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel DAK Pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan nilai koefisien 5,87 yang bertanda positif (+) menunjukkan bahwa DAK Pendidikan berpengaruh secara positif atau berbanding lurus terhadap variabel IPM. Artinya, jika DAK Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka IPM akan meningkat sebesar 5,87 poin.

- b. Variabel DAK Kesehatan pada mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK Kesehatan signifikan pada tingkat kepercayaan 95 persen ($\alpha=0,05$). Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel DAK Kesehatan memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan nilai koefisien 2,58 yang bertanda positif (+) menunjukkan bahwa DAK Kesehatan berpengaruh secara positif atau berbanding lurus terhadap variabel IPM. Artinya, jika DAK Kesehatan mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka IPM akan meningkat sebesar 2,58 poin.
- c. Variabel DAK Lain-Lain pada mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0331 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel DAK Lain-Lain memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan nilai koefisien 2,78 yang bertanda positif (+) menunjukkan bahwa DAK Lain-Lain berpengaruh secara positif atau berbanding lurus terhadap variabel IPM. Artinya, jika DAK Lain-Lain mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka IPM akan meningkat sebesar 2,78 poin.
- d. Variabel Pertumbuhan Ekonomi pada mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0039 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan nilai koefisien 1,94 yang bertanda positif (+) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara positif atau berbanding lurus terhadap variabel IPM. Artinya, jika Pertumbuhan Ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1 persen, maka IPM akan meningkat sebesar 1,94 poin.
- e. Pengaruh langsung variabel DAK Pendidikan terhadap IPM memiliki pengaruh paling besar yaitu 5,87 dibandingkan dengan pengaruh langsung DAK Lain-lain terhadap IPM sebesar 2,78, pengaruh langsung DAK Kesehatan terhadap IPM sebesar 2,58, dan pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap IPM sebesar 1,94. Sedangkan, pengaruh tidak langsung DAK Kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh paling besar sebesar 14,84 ($7,65 \times 1,94$) dibandingkan pengaruh tidak langsung DAK Lain-lain terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,64 ($1,36 \times 1,94$), dan pengaruh tidak langsung DAK Kesehatan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 2,46 ($1,27 \times 1,94$).
- f. Pengaruh total variabel penelitian berdasarkan hasil analisis, diperoleh jumlah pengaruh DAK Pendidikan terhadap IPM sebesar 8,33 ($5,87+2,46$), jumlah pengaruh DAK

Kesehatan terhadap IPM sebesar 17,42 (2,58+14,84), jumlah pengaruh DAK Lain-lain terhadap IPM sebesar 5,42 (2,78+2,64), dan jumlah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM sebesar 1,94. Dengan demikian pengaruh paling besar dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel DAK kesehatan terhadap IPM.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa DAK bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. DAK bidang pendidikan juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astri (2013) dan Baeti (2013) yang juga menemukan bahwa alokasi dana pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurudeen dan Usman (2010) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). DAK bidang kesehatan juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri (2013) yang menemukan bahwa pengeluaran di bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Besar kecilnya anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah pada bidang kesehatan dipengaruhi oleh minat masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah. Begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakare dan Olubokun (2011) yang menemukan bahwa DAK bidang kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja bidang kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa DAK bidang lain-lain berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). DAK bidang lain-lain juga berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kusharjanto dan Kim (2011) mengenai hubungan infrastruktur dan IPM di Pulau Jawa, menyimpulkan bahwa peningkatan infrastruktur dasar berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM begitupun dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anitasari dan Sholeh (2015) dalam penelitiannya menyatakan

bahwa pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Wagner yang menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak terhadap pembangunan manusia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori Dornbusch & Fisher yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan cerminan dari kebijakan fiskal yang merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012) dan Baeti (2013) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia (IPM).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya, apabila terjadi peningkatan alokasi DAK bidang pendidikan maka IPM akan meningkat. DAK bidang pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya pengaruh DAK bidang pendidikan terhadap IPM dapat diperkuat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh DAK bidang pendidikan maka akan terjadi peningkatan IPM.
2. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi khusus (DAK) bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya, apabila terjadi peningkatan alokasi DAK bidang kesehatan maka IPM akan meningkat. DAK bidang kesehatan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya pengaruh DAK bidang kesehatan terhadap IPM dapat diperkuat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh DAK bidang kesehatan maka akan terjadi peningkatan IPM.
3. Hasil penelitian menunjukkan dana alokasi khusus (DAK) bidang lain-lain (infrastruktur) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Artinya, apabila terjadi peningkatan alokasi DAK bidang lain-lain maka IPM akan meningkat. DAK bidang lain-lain juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan

ekonomi. Artinya pengaruh DAK bidang lain-lain terhadap IPM dapat diperkuat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh DAK bidang lain-lain maka akan terjadi peningkatan IPM.

4. Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula IPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memediasi pengaruh antara DAK bidang pendidikan, DAK bidang kesehatan dan DAK bidang lain-lain (infrastruktur) terhadap IPM, meskipun pengaruh yang diberikan masih rendah dibandingkan variabel penelitian yang lain.

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DAK bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain memberikan pengaruh yang signifikan baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun terhadap pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga perlu ditingkatkan alokasi DAK pendidikan, kesehatan dan lain-lain agar semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan pada perbaikan sumber daya manusia dan pembangunan manusia. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan akses pendukungnya untuk meningkatkan produktivitasnya karena masyarakat yang produktif akan membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pembangunan manusia suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anitasari, M. & Soleh A., 2015. *Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Ekombis Review, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Astri, M., 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 1. No. 1.

- Bakare, A.S dan Sanmi Olubokun, 2011. *Health Care Expenditure and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Study*. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences. Vol. 2/2, hal: 83-87.
- Baeti, N., 2013. *Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. EDAJ 2(3), 2013, hal:85-98.
- Boediono, 1999. *Ekonomi Makro*. Edisi 3. Yogyakarta. BPFE.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: LP3ES.
- Halim, Abdul, dkk, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kusharjanto, H., and Kim, D., 2011. *Infrastructure And Human Development: The Case of Java. Indonesia*. Journal of Asia Pacific Economy. 16(1), hal: 111-124.
- Mirza, Denni Sulistio, 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, EDAJ. Vol 1, hal:1-15.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hari Adi, 2008. *Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS. Surabaya, 6 September 2008*.
- Novianti et al. 2016. *Pengaruh Ukuran Legislatif, Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. E-Jurnal Bunghatta Volume 9, No 1.
- Nurudeen, Abu. Usman, Abdullahi, 2010. *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria, 1970 – 2008: A Disaggregated Analysis*, Business and Economic Journal, June.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Tambunan, Tulus, 2011. *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P. Dan Munandar, H., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.

UNDP (*United Nations Development Programme*), 1990. *Global Human Development Report, Human Resources Department*. www.undp.org, diakses 8 Januari 2018.